Warisan
Journal of History and Cultural Heritage
Volume 4
Issue 3
December 2023
ISSN: 2746-3265 (Online)
Published by
Mahesa Research Center
sinta S5

Pendudukan Jepang di Pontianak, 1941-1943

Japanese Occupation in Pontianak, 1941-1943

Reyhan Ainun Yafi*, SMAN 1 Rasau Jaya, Kubu Raya, Indonesia
Yusri Darmadi, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII, Pontianak, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze whether the socio-economic conditions of Pontianak people at the time of the arrival of Japanese troops were a factor in their unpreparedness to face attacks. The method used in this study is the historical method. The sources used were newspapers, among others, West Borneo Shimbun, Akcaya Daily, and Evening Post. The results showed that Pontianak society at the beginning of the arrival of the Japanese was very diverse in terms of war preparedness. Some of the residents of Pontianak City at that time were traders. They were busy trading and were unaware of the changing political situation of Asia in general and the Dutch East Indies in particular. The Japanese landing in Pontianak caused the destruction of the social and economic infrastructure of trade due to the mistakes of the Japanese army in dropping bombs on target targets. However, the destruction was also triggered by the lack of preparation of the Dutch colonial government for the arrival of Japanese troops in Pontianak.

ARTICLE HISTORY
Submitted 04/12/2023
Revised 14/12/2023
Accepted 24/12/2023
Published 28/12/2023

KEYWORDS
Political consciousness; Japanese army; World War Two; Pontianak.

*CORRESPONDENCE AUTHOR
reyainunyafi@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.34007/warisan.v4i3.1991

PENDAHULUAN

Masyarakat Pontianak memiliki komposisi demografi yang multi-ras dan multi-bahasa yang dibuktikan dengan data bahwa pada pertengahan abad 20, komposisi etnis yang mendiami kota Pontianak yaitu Melayu, Banjar, Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Batak, Cina dan Dayak (Alqadrie & Sastrowardoyo, 1984). Keberadaan beberapa etnis di Pontianak merupakan hasil migrasi yang dilakukan berdasarkan tiga faktor yang melatarbelakanginya: 1) sebagai pusat pemerintahan Kalimantan Barat; 2) sebagai kota dagang; dan 3) sebagai kota pelabuhan (Nurcahyani, Sulistyorini, & Hasanudin, 1999). Hal tersebut dapat terkonfirmasi dengan kehadiran beberapa kampung yang diberi nama sesuai dengan masing-masing etnis seperti Kampung Jawa Tengah, Kampung Banjar, Kampung Bugis, dan Kampung Arab.

Mata pencaharian perdagangan diminati oleh sejumlah etnis yang ada di Pontianak. Oleh karena itu, Pontianak juga dikenal luas sebagian masyarakatnya sebagai pedagang sejak abad ke-19 (Hasanuddin, 2016). Masyarakat berdagang dengan memanfaatkan letak strategis Pontianak dengan melakukan ekspor komoditas yang dihasilkan seperti kelapa sawit, karet, lada dan hasil hutan lainnya. Di mana pelabuhan Pontianak menjadi tempat persinggahan kapal-kapal besar dan dijadikan kota dagang bagi bangsa Eropa, Cina dan pedagang-pedagang dari Nusantara lainnya (Nurcahyani et al., 1999).

Tabel 1. Mata pencaharian masyarakat Pontianak berdasarkan suku bangsa, 1900-1950.

Mata Pencaharian	Suku Bangsa
Pertanian/ Perkebunan	Jawa, Madura, Melayu Cina
Perdagangan	Cina, Arab, Bugis, India, Melayu, Padang
Pegawai Negeri	Jawa, Melayu, Sunda
Angkatan Bersenjata	Jawa, Ambon, Batak, Manado
Pengrajin	Cina, Melayu, Bugis
Guru	Padang, Melayu
Tukang	Melayu, Cina
Jasa	Cina, Jawa
Buruh	Melayu, Cina

Sumber: (Alqadrie and Sastrowardoyo, 1984)

© 2023 The Author(s). Published by Mahesa Research Center
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Sebagai kota perdagangan strategis, Pontianak merupakan target pendaratan utama dan serangan terencana pasukan Jepang di wilayah *Dutch Borneo* (Gin, 2011; Huff, 2020; Jong, 1985). Namun, Pontianak juga menjadi daerah penting untuk meningkatkan produksi industri yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Jepang untuk kebutuhan perang. Alasan saat itu Jepang memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi untuk digunakan sebagai bahan bakar para pejuang perang Jepang. Kepadatan penduduk yang rendah juga menjadi kriteria bagi kaisar Jepang yang menginginkan Pulau Kalimantan menjadi jajahan Jepang, jumlah penduduk Kota Pontianak saat itu sekitar 50.000 jiwa, 600 di antaranya adalah orang Eropa sehingga dengan mudah dalam menginvasi (Gin, 2011; Heekeren, 1968). Namun demikian, Pontianak mengalami guncangan awal yang sangat dahsyat akibat ekspansi Jepang pada awal perang dunia kedua di Asia.

Tentu saja, dampak psikologis yang diperoleh masyarakat Pontianak akibat ekspansi Jepang menjadi masalah awal dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Yafi, Firmansyah, & Mirzachaerulsyah, 2021). Tidak hanya itu, kedatangan tentara Jepang membawa perubahan pada bidang sosial ekonomi masyarakat Pontianak saat itu. Dampak psikologis terlihat dari banyaknya masyarakat Pontianak yang meninggalkan kota Pontianak karena takut menjadi korban serangan lanjutan oleh pemerintah militer Jepang. Kota Pontianak digambarkan sebagai kota mati karena tidak ada kehidupan selain korban jiwa yang berjatuhan sehingga tak ada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Pontianak. Selain itu, masyarakat Pontianak mengalami trauma pasca penyerangan militer Jepang. Pemulihan dari pengalaman traumatis ini memerlukan waktu dan dukungan psikologis yang memadai.

Lebih lanjut terdapat beberapa penelitian terkait dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan selama pendudukan Jepang di setiap wilayah di Indonesia seperti, (1) penelitian yang dilakukan oleh Riady dkk (Riady, Ibrahim, and Martini, 2022) berjudul *"Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Bogor Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945"* mengulas kehidupan masyarakat di Bogor pada masa pendudukan Jepang; (2) tesis yang ditulis oleh Istifaroh (Istifaroh, 2014) dengan judul *"Kebijakan Pendudukan Pemerintah Jepang terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Rakyat Surabaya Tahun 1942-1945"* mengulas pengaruh kebijakan kependudukan pemerintah Jepang di Surabaya tahun 1942-1945. Apabila merujuk dari 2 contoh penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mencoba mencari kebaharuan dengan menganalisis dampak awal kedatangan Jepang dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Pontianak. Selain itu, untuk melihat kebijakan yang diterapkan pemerintah militer Jepang dalam memulihkan trauma masyarakat Pontianak pasca penyerangan. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis ditujukan untuk mengetahui kondisi masyarakat Pontianak ketika pendudukan Jepang. Secara praktis dapat dijadikan sumber pengembangan penelitian dengan topik yang sama untuk dikaji.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan beberapa proses penelitian diantaranya, pemilihan topik, pemilihan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan penulisan (historiografi) (Priyadi, 2012). Dari sisi pemilihan topik diambil karena belum ada penelitian yang menjelaskan kondisi masyarakat Pontianak pada awal pendudukan Jepang. Setelah itu, dilakukan seleksi sumber-sumber terkait literatur yang relevan seperti sumber buku tentang pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, buku *Rode Zon Boven Borneo*, arsip *Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie* (NIOD) dan surat kabar seperti *Borneo Barat Shinbun* dan surat kabar internasional seperti *Evening Post* dan *Canberra Times*. Tentunya sumber-sumber yang telah diperoleh dianalisis terkait validitas dan keaslian sumber-sumber tersebut dengan kritik internal maupun kritik eksternal (Sjamsuddin, 2012). Setelah memeriksa sumber-sumber yang diperoleh, dapat disimpulkan kelayakan beberapa sumber tersebut untuk digunakan sebagai sumber primer dan sekunder dalam tulisan ini. Kemudian fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari sumber-sumber yang dilalui pada tahap sebelumnya ditafsirkan secara kronologis, akurat dan faktual. Tahap terakhir yang dilakukan adalah penulisan sejarah yang menekankan aspek kronologis atau pembajakan dalam tulisannya (Kuntowijoyo, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Penyerangan Jepang di Pontianak

Kesadaran masyarakat terkait politik dunia pada umumnya, dan Asia pada khususnya masih sangat minim ketika Jepang tiba di Pontianak. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat kota Pontianak yang pada saat itu masih disibukkan dengan masalah perdagangan mulai dari terus beroperasinya pasar terapung dan hilir mudik kapal-kapal Bandong untuk membawa barang dagangan seperti biasa (Achmad, 1996). Selain itu, sejumlah orang Belanda yang tertinggal di Pontianak semuanya pergi bekerja seperti biasa, baik itu kantor, sekolah atau lainnya. Pagi berjalan normal, hingga

sekitar jam 12 siang terdengar suara mesin pesawat yang familiar, karena tiga pesawat dronier Belanda rutin lepas landas dari sungai dan mendarat di sana, sebagian besar tidak memperhatikannya (Heekeren, 1968).

Minimnya pengetahuan masyarakat Pontianak, diantisipasi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan pengetahuan terkait bahaya perang. Pembekalan tersebut berupa sosialisasi terkait tanda-tanda bahaya berupa bunyi alarm jika terjadi serangan musuh. Ketika tanda bahaya berbunyi, masyarakat diarahkan untuk bisa berlindung di tempat-tempat yang telah dibangun pemerintah seperti di lahan rawa. Kalau tidak, seseorang harus pergi ke hutan karet di sekitarnya atau mencari tempat berlindung yang dilindungi oleh kasur di bawah tempat tidur. Selain itu, pada tanggal 18 Desember 1941 pemerintah Hindia Belanda di Pontianak menggunakan kapal *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) yang biasanya digunakan untuk menjamin pasokan beras dari Jawa, melakukan evakuasi pertama demi mengamankan adanya bahaya datangnya perang (Heekeren, 1968).

Sejumlah antisipasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda harus memberikan kesiapan bagi masyarakat Pontianak terhadap serangan pasukan Jepang. Namun, ketidaksiapan justru menjadi gambaran pemerintah Hindia Belanda yang berdampak pada masyarakat Pontianak. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah korban jiwa akibat serangan sembilan pesawat tempur milik tentara Jepang di Pontianak dengan bom berdaya ledak tinggi pada 19 Desember 1941 (Achmad, 1996; "Bombs on Borneo," 1941; Yanis, 1983). Di mana Jepang menjatuhkan bom dengan sasaran awal kamp KNIL Belanda di Pontianak, namun meleset ke beberapa daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat Pontianak seperti Kampung Melayu, Kampung Bali, Jalan Toapekong dan Parit Besar (Tony, 1996). Peristiwa ini disebut insiden kapal terbang sembilan (Yanis, 1983).

Rute penyerangan yang dilakukan tentara Jepang di Pontianak dibagi menjadi dua. Rute pertama yang dilalui adalah dari utara ke selatan kota Pontianak dengan sasaran tangsi KNIL Belanda di Pontianak. Setelah itu, tentara Jepang menuju rute kedua, yakni tenggara hingga barat laut Pontianak. Pada rute kedua ini, pemukiman Cina yang terletak di jalan Parit Besar menjadi daerah paling tragis akibat serangan sembilan pesawat tempur tentara Jepang dengan menjatuhkan bom dan menembakkan senapan mesin.

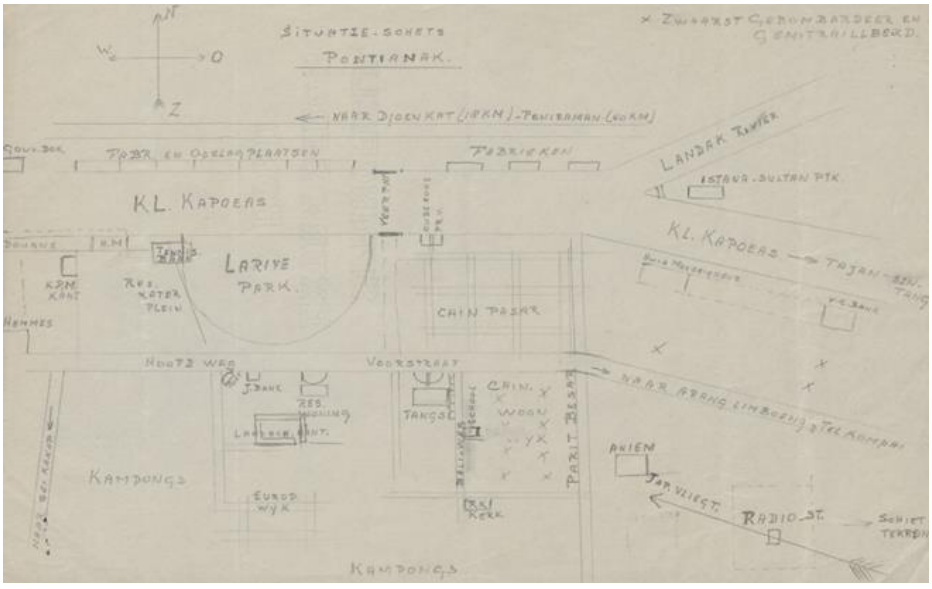

Gambar 1. Peta Kota Pontianak 1948. Sumber: (Bruin, 1948)

Menurut Bruder Bruno, yang merupakan seorang guru di *Holland Chinese School* (HIS) di Pontianak, ada 20 siswa tewas di sekolahnya dan beberapa lainnya terluka. Sementara itu, menurut Bruder A. Adikarjana, ada 2.500 orang sebagai korban dengan sembilan bom yang dijatuhkan oleh Jepang (Effendy, 1982). Total korban tewas diperkirakan 300 dan jumlahnya meningkat dua kali lipat setelah banyak orang yang terluka parah meninggal (Bruin, 1948). Kesaksian dari kepala Rumah Sakit Katolik Roma di Pontianak, dr. Heilbrunn menyatakan bahwa total 150 orang meninggal, 180 orang luka-luka, 50 sampai 75 orang luka ringan dan meninggal di rumah sakit ± 50 orang (Heekeren, 1968).

Ada beberapa sumber surat kabar internasional yang juga menyampaikan berita tentang korban tewas akibat serangan pasukan Jepang di Pontianak. Menurut laporan yang dimuat dalam surat kabar *Evening Post* edisi 30 Desember 1941, "serangan udara Jepang di Pontianak menyebabkan korban tewas sebanyak 128 orang" ("Conflict In Pasicif,"

1941). Sementara itu, menurut surat kabar *The Canberra Times* edisi 10 Maret 1942 dengan judul *Japanese Pilots: Machine-gun School Children* menyebutkan bahwa "ketika anak-anak berlari ketakutan berteriak minta berlindung, tentara Jepang menembaki mereka dengan senapan mesin dari jarak dekat. Lebih dari 200 anak tewas dan 1000 terluka" (Times, 1942).

Serangan pasukan Jepang terhadap Pontianak yang menimbulkan banyak korban jiwa tidak lepas dari kesadaran pemerintah kolonial Belanda yang bertugas membunyikan alarm bahaya sehingga masyarakat Pontianak tidak sadar akan bahaya tersebut. Menurut kesaksian kepala sekolah dasar Eropa, F. J. Schippers melalui tulisannya, "saya pergi ke luar sejenak dan melihat 9 pesawat pengebom terbang tinggi di langit biru yang terang dalam formasi penerbangan. Mereka terbang dari Utara ke Selatan. Tidak ada alarm serangan udara. Oleh karena itu, semua orang menganggap bahwa ini adalah pesawat Belanda atau Sekutu" (Heekeren, 1968). Hal yang sama disampaikan oleh inspektur bea cukai di Pontianak, W. H. Bruin yang berada di pelabuhan bersama kepala pelabuhan, A. J. Tomei yang hanya mendengarkan peluit dan tidak ada sinyal bahaya yang terdengar sebelum bom pertama kali dijatuhkan. Nyonya Van der Werf juga bersaksi bahwa ada kesalahan dalam menandakan bahwa semuanya aman. Oleh karena itu, menimbulkan kegemparan di masyarakat Pontianak dan menimbulkan banyak kepanikan dan kerumunan di jalan sehingga menjadi incaran utama tentara Jepang.

Kondisi Kota Pontianak Pasca Serangan Militer Jepang

Dihitung selama lebih dari satu bulan dihabiskan oleh Jepang untuk menyerang dan mendarat di Pontianak (Gin, 2011). Setelah itu, ada yang disebut kekosongan kekuasaan. Beberapa warga di Pontianak seperti tentara KNIL, pegawai Belanda, karyawan perusahaan Belanda dan warga setempat memilih mengungsi atau mengungsi dari Kalimantan Barat (Achmad, Rachman, Soedharto, & A, 1981). Pontianak digambarkan sebagai kota yang sepi. Pernyataan itu disampaikan oleh seorang guru di Singkawang yang sedang berkunjung ke Pontianak saat itu, Bruder Emanuel Compiet. Saat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya ada seekor ayam, dan tidak ada yang lain. Orang-orang tidak terlihat. Diperkuat dengan pemberitaan dalam surat kabar *Borneo Barat Shinbun* edisi 14 Oktober 1942, "sebagian besar masyarakat Pontianak memilih menjauh dari kota Pontianak dengan membuat gubuk-gubuk di sekitar kota Pontianak tanpa memandang pasang surut atau hujan deras yang terjadi" (Min, 1942d).

Saat itu juga digambarkan kondisi kota Pontianak yang sempat hancur akibat serangan pasukan Jepang. Semua telah terbakar habis. Mulai dari kediaman perwira di sekitar kamp KNIL Belanda di Pontianak dengan dua rumah hancur terbakar dan sisanya masih ada. Sekolah Cina di *Baliweg* juga menjadi sasaran dijatuhkannya bom dan daerah belakang sekolah menjadi daerah tragis di mana semuanya telah terbakar habis. Di dekat sekolah ada sebuah truk yang dikendarai untuk mengumpulkan korban di balik puing-puing bangunan yang hancur. Selain itu, ada organisasi *Luch Beschermings Dienst* (LBD) yang melakukan kegiatannya untuk mengangkut sejumlah korban jiwa akibat serangan udara Jepang ke Rumah Sakit Misi yang terletak 2 km dari daerah yang dibom (Bruin, 1948). Oleh karena kondisi kota Pontianak yang tenang cenderung menciptakan ruang hampa, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terjadi pembobolan ke beberapa bekas gudang milik perusahaan Belanda dengan mengambil beberapa jenis barang seperti beras, barang kelontong, tekstil dan lain-lain. Pembobolan ini dikenal sebagai peristiwa "cap kapak".

Setelah mustahil melawan tentara Jepang dan ketika melihat tiga pasukan Jepang yang tiba lebih dulu di kapal penyeberangan Pontianak, tentara kolonial Belanda di Pontianak melakukan taktik bumi hangus dengan membakar sejumlah tempat strategis, salah satunya adalah perusahaan dagang besar milik pemerintah kolonial Belanda, *Borneo Sumatra Maatschappij* (Borsumij) yang terletak di *weg* penduduk (sekarang jalan Tanjungpura tepatnya di jalan kapten Marsan) (Iseki, 1987). Hal ini setidaknya dilakukan untuk menyulitkan Jepang untuk dapat memanfaatkan aset yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda di Pontianak.

Kerusakan yang ditimbulkan akibat penyerangan Jepang di Pontianak menimbulkan kemerosotan dalam segi perekonomian masyarakat. Dari kondisi yang awalnya masyarakat Pontianak sibuk dalam melakukan perdagangan menjadi sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing karena trauma ada penyerangan susulan. Keselamatan menjadi yang utama daripada keuntungan dalam segi ekonomi.

Kebijakan Pemerintah Militer Jepang Saat Berkuasa di Pontianak

Terhitung lebih dari sebulan dihabiskan oleh Jepang untuk melakukan serangan. Setelah tidak ada serangan oleh Jepang, kota Pontianak lambat laun mulai ramai lagi dengan kembalinya orang-orang Pontianak dari tempat pengungsian mereka. Sistem pemerintahan yang ada di Pontianak diambil alih oleh Jepang pada tanggal 29 Januari 1942 dan menjadi

daerah terakhir bersamaan dengan Singkawang yang diinvasi (Achmad, 1996; Gin, 2011; Yafi et al., 2021). Setelah itu, berjalan seperti sebelumnya. Para pejabat dipanggil kembali untuk bekerja. Posisi yang sebelumnya dipegang oleh pegawai Belanda digantikan oleh Jepang (Benda, 1956; Shigeru, 1996).

Kehidupan di kota Pontianak menjadi hidup kembali dengan orang-orang yang berjualan di jalanan meskipun pada saat itu barang sangat sulit didapat. Ditambah lagi dengan munculnya beberapa perusahaan yang beroperasi yang telah didirikan oleh Jepang sebelumnya di Pontianak seperti Mitsubishi, Sumitomo, Nomura dan lain-lain. Disebutkan dalam catatan redaksi surat kabar *Borneo Barat Shinbun* edisi 15 Juli 1942 di mana Kepala Gunsei-Bu Cabang Pontianak Kalimantan Barat, S. Izumi memiliki peran yang sangat besar dalam meyakinkan masyarakat Pontianak untuk dapat kembali percaya diri dan menjalankan pekerjaannya masing-masing seperti semula. Peran yang dimainkan adalah dalam bentuk kesabaran dan penuh percaya diri. Orang-orang Pontianak yang sebelumnya memilih untuk meninggalkan Pontianak perlahan-lahan kembali meramaikan kota setelah kepercayaan diri mereka sendiri dipulihkan dan melakukan pekerjaan mereka seperti sebelumnya (Min, 1942e).

Dalam hal stratifikasi sosial, pemerintah militer Jepang tidak memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jepang menekankan prinsip kesetaraan dan persatuan dalam kehidupan sosial. Baik dalam kebijakan terkait ekonomi, maupun pendidikan (Hudaidah & Karwana, 2022; Muslimin & Hudaidah, 2021; Rochim, 2017).

Dari segi pendidikan, beberapa sekolah baru didirikan oleh pemerintah militer Jepang di Kalimantan Barat, salah satunya Pontianak. Di mana diperbolehkan bagi semua golongan masyarakat untuk mengenyam pendidikan (Prabowo, 2019; Yafi, 2022). Sedangkan segi ekonomi, simpati masyarakat Pontianak hadir ketika pemerintah *Minseibu* mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi keseharian mereka seperti membagikan beras menggunakan kartu beras yang disesuaikan dengan jumlah orang di rumah, pembagian garam dan rokok dengan harga terendah. Bagi pedagang diperbolehkan memasukkan beras dan garam ke Pontianak bebas dari bea masuk dan pembuatan garam bebas cukai dan tidak terbatas (Min, 1942f).

Beda halnya terkait gerakan-gerakan yang berbau organisasi politik, pendudukan awal Jepang di Pontianak sangatlah diperketat. Terdapat tiga belas organisasi pemuda yang ada sejak pemerintah Belanda berkuasa di Pontianak. Semua organisasi ini dibubarkan oleh Jepang di awal pendudukannya dan para pemimpin organisasi ditangkap dengan alasan anti-Jepang seperti Pattisiana (*ex-Hoofh Comies* dari Pemerintah Belanda), Al Ma'un, Richard (*ex-Hoofh Inspecteur van Politie* dari Pemerintah Hindia Belanda). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 yang dikeluarkan oleh Otoritas Tentara Dai Nippon di Jakarta tentang Larangan Berkumpul dan Bersidang (Min, 1942c).

Terkait dengan peraturan larangan tersebut dijelaskan dalam rapat di *Hopbiro* Kepolisian, Surabaya yang menghasilkan beberapa informasi terkait penegasan UU No. 23 diantaranya:

a) "Sehubungan dengan terbitnya UU No. 23, semua organisasi (politik, sarekat kerja (buruh) dan lain-lain) harus dibubarkan. Untuk mencegah kesalahpahaman, ditegaskan sekarang bahwa semua gerakan perkumpulan ini tidak dihentikan sementara, tetapi mulai hari ini (27 Juli 1942) semua perkumpulan di seluruh Indonesia harus dibubarkan."
b) Pimpinan semua organisasi tersebut harus segera mengirim surat kepada Kepala Polisi *Afdeeling* PID yang menyatakan bahwa organisasi tersebut telah dibubarkan. Organisasi di tingkat cabang cukup hanya Ketua Umum nya saja.
c) Untuk membubarkan perkumpulan, tidak boleh diadakan rapat, diputuskan oleh Ketua saja.
d) Semua kekayaan perkumpulan, yang dibubarkan, dalam bentuk apa pun, dipegang dan dikuasai oleh Ketua Perkumpulan, sehingga ada keputusan lain tentang hal itu. Kekayaan cabang harus dipegang oleh Ketua cabang.
e) Perkumpulan-perkumpulan, yang diperbolehkan hanyalah majelis-majelis yang dimaksud dalam undang-undang No. 23. Tapi izin harus diminta dulu.
f) Perkumpulan-perkumpulan, yang sekarang dibubarkan, tidak boleh berkecil hati, tetapi mereka masih harus diberi kesempatan untuk mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah (ditujukan kepada Kepala Polisi *Afdeeling* PID) untuk mendirikan (kembali) perkumpulan-perkumpulan mereka. Tetapi pertemuan politik sepenuhnya dilarang.
g) Juga organisasi Koperasi, yang masih memiliki piutang, harus menghentikan semua transaksi mereka. Penagihan dan/atau pembayaran utang harus ditunda ("Larangan Sidang Dan Berkumpul," 1942; Min, 1942c).

Penahanan Jepang terhadap para pemimpin organisasi yang dianggap anti-Jepang bersifat sementara. Terbukti setelah sembilan hari pendudukan Jepang di Pontianak, para pemimpin ini secara sukarela dibebaskan oleh Jepang dengan alasan telah bersumpah untuk mendukung Jepang (Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, 1991). Ketika mereka mengetahui bahwa Banjarmasin akan melakukan pengkhianatan di bawah kepemimpinan mantan Gubernur Haga akan memberontak, orang-orang seperti Pattiasina, Panangian, Adipati yang memiliki sifat bertarung juga

berencana untuk memberontak. Namun hal itu tidak didukung sepenuhnya oleh etnis Tionghoa yang saat itu masih melihat kondisi yang ada (Halim, 1977; Koakimoto, 1944).

Pattisina dkk diam-diam menyusun strategi untuk menentang pemerintahan Jepang di Pontianak. Pada bulan Mei 1942, ada 22 orang bertemu dalam musyawarah yang terdiri dari perwakilan 13 organisasi yang telah dibubarkan oleh Jepang sebelumnya. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk menghilangkan perselisihan dan bersatu dengan tujuan melawan Jepang (Koakimoto, 1944). Akhirnya didirikan sebuah organisasi bernama *Nissin-kwai* tanggal 24 Mei 1942 yang berarti Badan Pengembangan Pemuda dan Masyarakat (Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, 1991). Secara gamblang tertuang dalam Anggaran Dasar *Nissinkai* di surat kabar *Borneo Barat Shinbun* edisi 18 Juli 1942 yang berbunyi:

> "Pasal 2 menyatakan bahwa organisasi bermaksud untuk mencapai Persemakmuran Asia Timur Raya. Dan pasal 3 berbunyi cara untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu, a) melipatgandakan (penebalan) semangat bekerja sama dalam lingkungan kemakmuran Asia Raya yang dianjurkan oleh Nippon; b) memperkuat semangat persatuan bangsa-bangsa Asia dengan menghormati budaya masing-masing kelompok; c) menghambat masuknya komintern di Asia, khususnya di Indonesia (Min, 1942a)."

Dalam perjalanannya, organisasi ini berusaha mengajak seluruh elemen masyarakat Pontianak yang masih terpecah belah melalui beberapa organisasi untuk dapat bersatu dengan organisasi *Nissin-kwai*. Maksud yang ingin tentara Jepang lakukan adanya satu organisasi yaitu untuk dapat lebih nyaman memantau pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat Pontianak. Tetapi kehidupan organisasi ini sangat singkat. Terbukti pada bulan Oktober 1942 organisasi ini dibubarkan oleh Pemerintah Minseibu Pontianak dengan alasan dalam berjalannya organisasi telah menyimpang dari tujuan awalnya dan dicap sebagai anti-Jepang (Koakimoto, 1944).

Terkait dengan penegasan di atas memberikan gambaran sejauh mana pemerintah militer Jepang dalam melaksanakan segala kebijakannya bagi masyarakat Pontianak tidak melakukan kegiatan di luar koridor yang dicita-citakan oleh Jepang (Jong, 1985). Sehingga sangat mempengaruhi kegiatan sosial yang akan dilakukan oleh masyarakat Pontianak. Gerakannya selalu di bawah pengawasan dan tidak bersifat bebas dalam bergerak. Meskipun dalam peraturan tentara Jepang disebutkan bahwa asosiasi politik, serikat pekerja/ buruh wajib dibubarkan, pada kenyataannya ada pengecualian di mana jika ada izin bisa berjalan.

Setelah pengumuman terkait UU No. 23, beberapa organisasi yang ada mengajukan pembubaran dengan diwakilkan oleh ketuanya. Salah satu organisasi yang mengajukan pembubaran di Kalimantan Barat adalah Parindra. Dinyatakan dalam surat kabar *Borneo Barat Shinbun* edisi 9 September 1942 bahwa surat kabar itu adalah:

> "Pada tanggal 9 Kugatsu 2602, tuan Ranie Soelaiman selakoe Ketoea dari Madjelis Wilayah Parindra, Kalimantan Barat, telah menyampaikan kepada pemerintah untuk menjelaskan tentang pembubaran Parindra di Indonesia dan Kalimantan Barat. Putusan ini diambil berdasarkan bunyinya UU No. 23 dari Otoritas Tentara Dai Nippon di Jakarta dan larangan bunyinya untuk berserikat dan berkumpul yang dimuat dalam surat kabar Asia Raya yang yang diterbitkan di Jakarta pada 27 Djoeli 2602 No. 49 (Min, 1942b)."

Pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah Minseibu pada setiap hal yang berkaitan dengan urusan internal. Terutama tentang kehidupan masyarakat Pontianak itu sendiri. Hal ini disebutkan dalam *Borneo Barat Shinbun* edisi 7 November 1942 yang menyatakan bahwa "karena itu juga ternyata dimasa Pemerintah Minseibu sekarang ini, segala-galanya yang bersangkut-paut dengan urusan negeri dan rakyat, atau pendek kata urusan Keperintahan mendapat penyelidikan yang seksama sebelumnya diambil keputusannya" (Min, 1942e).

Hal yang sama berlaku untuk kebebasan dalam hal mengekspresikan pendapat melalui surat kabar. Pemerintah Jepang mengawasi dengan cermat isi surat kabar yang ingin diterbitkan. Ketika tidak sesuai dan menyimpang jauh dari cita-cita yang diinginkan oleh pemerintah Jepang, tulisan tersebut tidak akan dipublikasikan. Bahkan untuk mengawasi segala macam tindakan masyarakat, pemerintah Jepang membentuk Departemen Propaganda (*sendenbu*) (Kurasawa, 2015). Terdapat beberapa surat kabar seperti *Borneo Barat Shinbun*, *Seibu Borneo Shinbun*, dan *Borneo Simboen* yang terbit langsung di bawah pemerintahan militer Jepang di kota Pontianak.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kondisi masyarakat Pontianak pada awal kedatangan Jepang menimbulkan banyak jatuhnya korban jiwa akibat serangan yang tidak disadari oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah penyerangan militer Jepang, kegiatan masyarakat Pontianak yang biasanya dilakukan tidak terlihat satu pun.

Masyarakat Pontianak terlihat sibuk mencari daerah yang aman untuk berlindung sehingga kota Pontianak menjadi kota yang sepi dan terjadi beberapa pembobolan terhadap toko-toko kelontong yang tak berpenghuni. Kebijakan pemerintah militer Jepang yang bersifat menguntungkan bagi masyarakat Pontianak dilakukan di awal kedatangannya. Tetapi setelah itu banyak kebijakan yang dilakukan hanya menguntungkan pemerintah militer Jepang saja dibandingkan masyarakat Pontianak dengan alasan kebutuhan perang Asia Timur Raya.

REFERENSI

Achmad, J. (1996). *Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat Sebuah Kasus: Pembunuhan Massal*. The Borneo Research Council Fourth Biennial International Conference Brunei Darussalam.

Achmad, J., Rachman, A., Soedharto, & A, W. (1981). *Sejarah Perlawanan Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Alqadrie, S. I., & Sastrowardoyo, P. (1984). *Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Benda, H. J. (1956). The beginnings of the Japanese occupation of Java. *The Journal of Asian Studies*, *15*(4), 541–560. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2941923

Bombs on Borneo. (1941, December 20). *Evening Post*, p. 7.

Bruin, W. H. (1948). *Japans bombardement op Pontianak (Borneo) op 19 december 1941; oorlogsvoorbereiding*.

Effendy, M. (1982). *Sejarah Perjuangan Kalimantan Barat*. Pontianak.

Gin, O. K. (2011). *The Japanese Occupation of Borneo, 1942-1945*. London dan New York: Routledge.

Halim, R. (1977, June 16). Mengenang Kembali 20.000 Korban Agresi Militer Jepang di Kalimantan Barat. *Harian Umum Akcaya*, p. 1.

Hasanuddin, H. (2016). Politik dan Perdagangan Kolonial Belanda di Pontianak. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, *8*(2), 203–218. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v8i2.73

Heekeren, C. van. (1968). *Rode zon boven Borneo*. Den Haag: Bert Bakker/Daamen.

Hudaidah, H., & Karwana, M. A. P. (2022). Pendidikan Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Danadyaksa Historica*, *1*(2), 97–104. https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jdh.v1i2.4243

Huff, G. (2020). *World War II and Southeast Asia: Economy and Society Under Japanese Occupation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Iseki, T. (1987). *Nishi Boruneo jūmin gyakusatsu jiken : kenshō "Ponteana Jiken."* Tokyo: Fuji Shuppan.

Istifaroh, A. (2014). *Kebijakan Pendudukan Pemerintahan Jepang Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Surabaya Tahun 1942-1945*. Universitas Jember.

Jong, L. D. (1985). *Pendudukan Jepang di Indonesia* (A. Bey, Ed.). Bekasi: PT Kesaint Blanc Indah Corp.

Koakimoto, R. (1944, July 1). Komplotan Besar Jang Mendoerhaka Oentoek Melawan Dai Nippon Soedah dibongkar sampai ke Akar-Akarnja. *Borneo Sinbun*, p. 2.

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Kurasawa, A. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*. Depok: Komunitas Bambu.

Larangan Sidang dan Berkumpul. (1942, July 27). *Asia Raya*.

Min, P. (1942a, July 18). Anggaran Dasar Dari Nis Sin Kwai. *Borneo Barat Shinbun*, p. 2.

Min, P. (1942b, September 9). Pemboebaran Parindra di Kalimantan Barat. *Borneo Barat Shinbun*, p. 2.

Min, P. (1942c, September 23). Larangan Bersidang dan Berkoempoel. *Borneo Barat Shinbun*, p. 2.

Min, P. (1942d, October 14). Keamanan Dikota Pontianak dan Sekitarnja. *Borneo Barat Shinbun*, p. 2.

Min, P. (1942e, November 7). Pemerentah Minseibu. *Borneo Barat Shinbun*, p. 3.

Min, P. (1942f, November 11). Dari Kalangan Kyooiku. *Borneo Barat Shinbun*.

Muslimin, Y., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, *1*(3), 114–118.

Nurcahyani, L., Sulistyorini, P., & Hasanudin. (1999). *Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra*. Jakarta: CV Ilham Bangun Karya.

Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. (1991). *Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*. Pontianak: Taurus.

Prabowo, M. R. (2019). Peristiwa Mandor 28 Juni 1944 di Kalimantan Barat: Suatu Pembunuhan Massal di Masa Penduduk Jepang. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, *2*(1).

Priyadi, S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Riady, N. R., Ibrahim, N., & Martini, S. (2022). Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Bogor pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, *2*(4), 487–502.

Rochim, R. S. (2017). *Pendidikan Pada Masa Pendudukan Jepang Di Surabaya Tahun 1942-1945*. Universitas Airlangga.

Shigeru, S. (1996). The pangreh praja in Java under Japanese military rule. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*, 586–608.

Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Times, T. C. (1942, March 10). Japanese Pilots: Machine-gun School Children. *National Library of Australia*, p. Two.

Tony, K. (1996). *Kalimantan Barat Pada Masa Pendudukan Jepang*. Universitas Sanata Dharma.

Yafi, R. A. (2022). Pendidikan Masa Awal Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat Tahun 1942. In *Dinamika Sejarah Perkembangan Pendidikan di Wilayah Indonesia*. Klaten: Lakeisha.

Yafi, R. A., Firmansyah, A., & Mirzachaerulsyah, E. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Jepang Melakukan Propaganda Melalui Surat Kabar Borneo Barat Shinbun. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, *10*(6).

Yanis, M. (1983). *Kapal terbang sembilan: kisah pendudukan Jepang di Kalimantan Barat*. Yayasan Perguruan Panca Bhakti.

©Reyhan Ainun Yafi & Yusri Darmadi